STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DALAM RELOKASI PKL ALUN-ALUN RBA KI RONGGO

Abu Sofyan

Universitas Bondowoso, Indonesia
sofyan@unibo.ac.id

ABSTRAK

Konsep penataan ruang kota yang tidak dilandasi pemahaman tentang informalitas perkotaan sebagai bagian integral dari sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang bagi sektor informal dalam hal ini para pedagang kaki lima. Kelompok ini sering dituding sebagai biang kemacetan dan pembuat onar. Hal itu disebabkan belum adanya perencanaan antisipatif dalam pengembangan ruang untuk memfasilitasi kegiatan PKL di kabupaten tersebut. Dengan demikian konsep hubungan masyarakat terhadap PKL juga harus dibangun oleh pemerintah Bondowoso, khususnya yang berlokasi di alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo. Karena dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih mengedepankan prinsip perencanaan partisipatif yaitu lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam penetapan prioritas kegiatan PKL, yang meliputi: (1) Strategic Extension Campaign (SEC), (2) Community Participatory Rural Appraisal (PRCA) dan (3) Participatory Community Strategy Design (PCSD). Dari ketiga metode strategi komunikasi strategi tanpa adanya keterlibatan peran pihak luar sebagai fasilitator pembangunan, perbedaan dari ketiga strategi tersebut terletak pada tujuan, yaitu (proses dan pendekatan, penerapan adaptornya untuk kondisi dan situasi masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, SEC, PRCA, PCSD, Partisipasi Masyarakat

Pendahuluan

Paradigma baru sektor informal melihat bahwa pedagang kaki lima memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sehingga perlu didukung dan difasilitasi. Namun dukungan dan fasilitas itu tidak akan banyak bermanfaat bagi sektor informal, seperti PKL, bila prosesnya tidak melibatkan para pelaku sektor tersebut. Akibatnya, program berbiaya mahal dapat menjadi sia-sia karena fasilitas tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan PKL. Pelajaran yang perlu diangkat adalah pemerintah hendaknya tidak lagi menganut paham bahwa PKL tidak mau ditata dan diatur. Justru pemerintah mesti mengintensifkan komunikasi partisipatif dengan PKL melalui paguyuban mereka agar dapat dihasilkan bentuk relokasi dan pembinaan

yang sejalan dengan kepentingan masing-masing.

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota. Pesatnya laju pertumbuhan perkotaan terutama di sebabkan oleh arus urbanisasi dari pedesaan, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diikuti oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan di masyarakat perkotaan, baik ekonomi maupun sosial budaya.

Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya arus urbanisasi yang besar dari pedesaan ke perkotaan yang paling utama adalah dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan yang mana hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pedesaan dalam menyediakan lapangan

kerja bagi penduduknya dikarenakan pertumbuhan ekonomi desa hanya 4%, dan di kota 6%. Faktor lain adalah daya tarik perkotaan selalu terbayang akan tersedianya lapangan kerja bagi pendatang untuk meningkatkan pendapatannya. Padahal mereka tidak memiliki keahlian khusus, sehingga kecenderungan usaha mereka adalah dibidang sektor informal yaitu sebagai Pedagang Kaki Lima.

Pemahaman ini akan menempatkan sektor informal sebagai bagian terintegral dalam sistem ekonomi perkotaan. Salah satu wujud pemahaman ini adalah menyediakan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL. Hal yang harus dikedepankan bahwa ruang yang dibangun tersebut adalah untuk rakyat miskin dan bukan untuk orang kaya.

Komunikasi partisipatif adalah komunikasi yang mengasumsikan (mensyaratkan) adanya proses humanis dengan menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam merespon setiap fenomena yang muncul dalam lingkungan kehidupannya. Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subjek dalam setiap perilaku yang diperankannya.

Pedagang kaki lima yang acapkali dipandang “sebelah mata” ataupun dikelompokkan secara minoritas sebagai pedagang ekonomi lemah selalu dikesampingkan dalam berbagai aktivitas penyusunan kebijakan pembangunan khususnya yang melingkupi aspek ekonomi lemah ke bawah. Termasuk kepentingan PKL itu sendiri. Padahal mereka termasuk individu yang bersifat dinamis dan menjadi subjek dalam pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, kelompok ini telah memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam menambah dan memperbesar sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai gambaran misalnya di Kabupaten Bondowoso, kontribusi PKL dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Bondowoso adalah 100 juta per

tahun dari retribusi yang dipungut pemerintah (suarajatimpost.com). pemusatan pedagang kaki lima di alun-alun ke RBA Ki Ronggo dilakukan sejak tahun 2004 dengan fasilitasi pemerintah daerah kabupaten bondowoso, yang dulunya PKL tersebut tersebar di beberapa pinggir jalan diantaranya Jl. A Yani, Jl. Santawi, Jl. Diponegoro, Jl. RE Martadinata dan beberapa jalan dilingkungan perkotaan kabupaten bondowoso.

Padat tahun 2017 pemerintah Bondowoso merencanakan relokasi PKL dari alun-alun RBA Ki Ronggo ketempat yang baru dengan pertimbangan tata kelola kota dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH), 108-150 pedagang kaki lima yang akan direlokasi ke tempat yang baru, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menerbitkan surat edaran terkait relokasi PKL tersebut sebagai langkah efektif penyampaian kepada para PKL yang memiliki kios di lokasi alun-alun RBA Ki Ronggo (RRI,12/10/2017).

Keberadaan sektor informal seperti PKL merupakan wujud tersedianya lapangan kerja. Dan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor formal bukanlah satu-satunya indikator tersedianya lapangan pekerjaan. Mereka yang memasuki kegiatan sektor informal seperti itu karena ingin mengembangkan kewirausahaan. Wirausaha bagi mereka jauh lebih menarik ketimbang bekerja di sektor formal. Selain itu minimnya tuntutan keahlian modal usaha, menjadikan mereka lebih mudah memasuki sektor ini.

Hasil penelitian yang dilakukan Eni Rustrianingsih (2003) terhadap PKL di Alun-alun Bondowoso menggambarkan bahwa keinginan mereka untuk berwiraswasta sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa 35,2% respon den menyatakan ingin berwiraswasta Sedangkan sisanya, 19,4% PKL menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan selama ini karena terpaksa, 17,3% menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan; 14% menyatakan Lainnya;

1,5% mengikuti orang tua berdagang. Bahkan ada yang menyatakan kalau aktivitas PKL tidak memerlukan modal besar. Mereka yang menyatakan tersebut sebanyak 11,2%. Dan yang menyatakan bahwa aktivitas PKL dilakukan karena sambil menunggu pekerjaan yang diharapkan sebanyak 1,3%.

Dari rencana yang di gaungkan oleh pemerintah kabupaten bondowoso tentang relokasi PKL di Alun-alun RBA Ki Ronggo mendapat perhatian penolakan yang serius dari para pemilik kios, faktor utamanya adalah Pemerintah mengabaikan PKL yang mencari nafkah sejak lama di tempat ini. Relokasi itu sama saja mematikan penghasilan PKL dan itu akan berdampak pada kemiskinan dan bertambahnyaang kapengangguran, (Mujjati, Ketua Paguyuban PKL Bondowoso). Lokasi baru pengganti los PKL sangat tidak representative dikarnakan tempat yang disediakan rawan longsor karena berada di bibir tebing sungai serta pemerintah kabupaten bondowoso tidak bisa serta merta dapat mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan para PKL dalam musyawarah relokasi sebab mereka telah terdaftar sebagai anggota Paguyuban PKL.

Konsep communiti relation yang berkenaan dengan PKL semestinya juga harus dibangun oleh pemerintah kota kabupaten di Indonesia. Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaanakan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Mereka harus mendapatkan perhatian yang serius dan pemangku kepentingan sertat idak boleh diacuhkan.

Berawal dari uraian tersebut permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi komunikasi organisasi pemerintah kabupaten Bondowoso dalam relokasi PKL Alun-alunRBA Ki Ronggokelokasibarujembatan Ki Ronggo.

Pembahasan

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 tahun 2017 telah mengatur dan menetapkan tentang relokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilingkungan perkotaan Kabupaten Bondowoso. Seluruh data pada bagian ini dipaparkan secara langsung berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi,wawancara dan dokumentasi adalah sebagai data primer, Kemudian beberapa data kami peroleh dari media masa terkait pemberitaan PKL adalah sebagai data sekunder. Sebagai sumber data mengenai kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso,peneliti mengambil narasumber dengan jumlah 6 orang tetapi key informan dalam penelitian ini adalah Sigit Purnomoselaku kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso. Hal ini diharapkan nantinya key informan tersebut dapat memberi informasi yang berhubungan dengan penelitian yang diadakan peneliti. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara purposive dan snowball sehingga penentuan informan atau narasumber sebagai data berdasarkan anggapan atau pendapat peneliti sendiri karena dianggap mengetahui permasalahan yang mampu memberikan informasi yang diperlukan.Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari key informan sebelumnya peneliti menetapkan sumber informan lainnya dengan pertimbangan mereka dapat memberikan data yang lebih lengkap.Berikut data narasumber:

N o	Nama	Jabatan/Pekerjaa n	Umu r
1	Sigit Purnomo	Kepala Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso	42 th
2	M. Zubairi	Pedagang Busana Muslim (Salah	57 th

		Satu Koordinator PKL)	
3	Suni	Penjual Mie Ayam	52 th
4	Wiwid	Pedagang Kopi dan Rokok	40 th
5	Adun	Pedagang Boneka	25 th
6	Ahmad	Pedagang Nasi	29 th

Tabel 4.1
Data Narasumber Penelitian

A. Strategi Komunikasi Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso dalam Relokasi PKL di Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Kabupaten Bondowoso.

Setelah adanya hasil pengamatan dan kunjungan ke dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso selaku pihak yang mempunyai kewenangan merelokasi PKL di Kabupaten Bondowoso khususnya mereka (PKL) yang berada di kawasan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso. Sejauh ini pihak dinas melalui satpol PP berupaya untuk merelokasi mereka yang sebelumnya berjualan di kawasan alun-alun serta mengembalikan fungsi dari alun-alun sendiri. Karena hal tersebut juga menjadi komitmen dinas terkait untuk mengembalikan alun-alun sebagaimana fungsinya. Seperti yang disampaikan Sigit Purnomo :

“sementak saya menjabat sebagai kepala Diskoperindag pada bulan februari 2017 saya bersama bapak nawari sepakat untuk mengembalikan alun-alun sebagaimana fungsi dari alun-alun itu sendiri yaitu yang pertama sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau), kedua sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ketiga sebagai tempat rekreasi masyarakat. (Wawancara 6 Agustus 2019).

Melihat kebutuhan ini maka Diskoperindag telah mengambil langkah-langkah dalam kaitannya tujuan

untuk mewujudkan alun-alun sebagai fungsinya maka langkah yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan sebuah pendataan terhadap PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso. Pendataan tersebut meliputi domisili dan status kependudukan para PKL. ternyata dari data yang diperoleh terdapat 30 % dan 760 PKL mereka adalah penduduk asli warga Kabupaten Bondowoso. Dengan melihat data yang telah diperoleh pihak Diskoperindag merasa optimis bahwa nantinya mereka dapat mewujudkan keinginannya dengan mengembalikan kondisi alun-alun seperti yang diharapkan karena PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso akan dilakukan relokasi kembali ke tempat yang baru yaitu Jembatan Ki Ronggo. Hal tersebut berdasar bahwa dengan jumlah yang tidak begitu banyak akan mempermudah bagi pihak Diskoperindag untuk melakukan sosialisasi sehingga komunikasi yang disampaikan cukup efektif. Selanjutnya dan pendataan tersebut oleh pihak Diskoperindag menindaklanjutinya dengan mensosialisasikannya dengan pihak instansi terkait (Dinas PM, PTSP dan Naker, Dinas LH dan Perhubungan, Bappeda, Dinas Parpora, Satpol PP, Bagian Hukum) khususnya dengan lembaga legislatif yaitu anggota DPRD. Seiring dengan berjalannya waktu pihak Diskoperindag mulai melakukan pendekatan dengan para PKL baik secara personal maupun kelompok melalui paguyuban PKL yang ada guna memberikan pemahaman bahwa alun-alun saat ini sudah tidak layak untuk ditempati selain itu kehadiran para PKL yang berada di alun-alun tidak sesuai dengan fungsi dari alun-alun itu sendiri. Dari sinilah terbingkai sebuah permasalahan-permasalahan baik yang dirasakan oleh para PKL maupun oleh pihak Diskoperindag sendiri. Proses perencanaan pun dilakukan oleh

Diskoperindag mengambil langkah-langkah maupun kebijakan apa yang tepat yang nantinya kesemuanya itu dapat menemukan titik temu dari semua permasalahan yang ada. Begitu juga dengan pihak PKL yang selalu menuntut adanya solusi apabila keberadaan mereka benar-benar akan direlokasi ke Jembatan Ki Ronggo. Seperti yang diungkap oleh Wiwid (40 Th) seorang pedagang assesoris yang menekuni usahanya selama 10 tahun adalah sebagai berikut:

“dipindah - ya dipindah mas tapi setelah itu bagaimana, kalau digusur terus tidak ada tempat untuk berjualan lagi ya sama saja. Sama dengan menelantarkan itu.” (wawancara 10 juli 2019)

Diskoperindag menyadari bahwa apa yang dilakukan instansinya akan menemui kendala, seperti yang diungkapkan oleh Sigit Purnomo

“Sosisialisasi terus menerus kami lakukan tingkatkan, memang ada gejala-gejala sedikit, ternyata di dalam sana itu banyak apa ya . . . ya katakan pre man atu apa ya... ,ya banyak juga. ini kita dekati, kita ajak omong-omong bagaimana membangun Bondowoso lebih baik.” (wawancara 6 Agustus 2019)

Penyediaan lahan baru salah satu solusi yang diberikan terhadap PKL adalah jalan yang terbaik dan terdapat tiga tempat sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 tahun 2017 pasal 4 yang berbunyi “Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. PKL Kuliner di area Jembatan Ki Ronggo b. PKL Kuliner disebelah selatan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bondowoso c. Sebagian area diluar Stadion Magenda Bondowoso” . Solusi yang diberikan setidaknya-tidaknya dapat meredam atas terjadinya konflik yang tidak

diinginkan. Meskipun pada kenyataannya relokasi PKL alun-alun tidak menemui suatu kendala yang berarti. Kesadaran PKL terus dibangun oleh pihak Diskoperindag atas pentingnya peran mereka dalam ikut serta berpartisipasi dalam rangka pengembangan pembangunan kota Bondowoso. Mereka diajak bersamasama untuk terlibat didalamnya tanpa peran mereka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan peran media dalam hal ini media cetak yang tidak lelah bersama dengan Diskoperindag untuk ikut mensosialisasikan Program-program kegiatan Diskoperindag selama ini khususnya dalam relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Sigit Purnomo, *“saya berterimakasih kepada pihak media cetak dalam hal ini adalah Koran Bhirawa, Radar Bondowoso dan Memo secara tidak langsung membantu mensosialisasikan atas program yang dijalankan oleh pihak Diskoperindag.”* (wawancara 6 Agustus 2019).

Media selama ini oleh pihak Diskoperindag digunakan sebagai alat publikasi sebagai kepanjangan tangan informasi atas program-program dijalankan oleh pemerintah.

Namun demikian masih belum ada titik temu antara pemerintah daerah dengan PKL terhadap rencana relokasi PKL ketempat yang lebih nyaman dan sesuai Perbub No.56 tahun 2017 bahwa tidak semua PKL bisa menempati lokasi baru tersebut hal tersebut jelas tertuang pada pasal 5.

Kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah daerah kabupaten bondowoso yang memiliki tanggung jawab terhadap relokasi PKL ini masih mencari solusi terbaik dalam agenda relokasi ke jembatan Ki Ronggo.” (wawancara 6 Agustus 2019).

B. Analisis strategi komunikasi Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso dalam Relokasi PKL alun-alun.

Kepedulian Diskoperindag terhadap pertumbuhan PKL yang semakin berkembang hal ini terjadi dikawasan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso yang dulunya berada di alun-alun Bondowoso, merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diimplimentasikan. Bagaimanapun pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui ketertiban dan didasarkan kepada kekuatan yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Dengan cara mereloksi mereka sekaligus memberi suatu wawasan kepada PKL arti penting sebuah pembangunan bahwa mereka sebagai kelompok yang mempunyai nilai terhadap perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Ife (1995:72) "Salah satu prinsip pengembangan syarakat yaitu : *empowerment*, pemberdayaan merupakan tujuan dan pengembangan masyarakat, pemberdayaan mengandung arti menyediakan sumber-sumber kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya menghilangkan berbagai hambatan yang akan menghalangi perkembangan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa pengembangan masyarakat menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya sehingga kegiatan pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan." Dengan

bertambahnya jumlah PKL, Diskoperindag menyadari bahwa bagaimanapun mereka adalah kelompok yang besar potensinya untuk diberdayakan bukan untuk disia-siakan. Dalam kegiatan perencanaan yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan diskoperindag berkeinginan bahwa kebijakan yang akan diputuskan nantinya tidak mengecewakan salah satu pihak terutama PKL Menurut R Dye (1992: 328) dalam pembuatan kebijakan melalui beberapa proses diantaranya;

1. Identifikasi masalah.
Dalam mengidentifikasi masalah langkah awal Diskoperindag yaitu Diskoperindag melihat bahwa semakin lama perkembangan PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso jumlah mereka semakin banyak hal inilah yang menjadi pokok permasalahan.
2. Penyusunan Agenda Setting.
Berkembangnya jumlah PKL bukan serta merta permasalahan yang dirasakan oleh Diskoperindag melainkan masyarakat pun juga merasakan dampak atas fenomena tersebut, suatu misal : jalur padat yang mengganggu lalu lintas dijalan yang dulunya mereka berjualan disekitar alun-alun, disamping itu produk sampah yang dihasilkan oleh PKL membuat masyarakat enggan untuk datang ke alun-alun segai wahana wisata keluarga.
3. Formulasi Masalah kebijakan
Diskoperindag telah memformulasikan dengan menskalaprioritaskan atas permasalahan yang ada khususnya PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso. Sehingga nantinya dapat terjawab pokok dan permasalahan PKL yang ada di Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso.

4. Mendesain Kebijakan

Dari permasalahan yang ada, maka Diskoperindag dapat merumuskan dan mencari solusi berupa kebijakan salah satunya yaitu penyediaan lahan baru (relokasi).

Pendekatan yang dilakukan oleh Diskoperindag dalam upaya sosialisasi baik melalui personal maupun paguyuban adalah merupakan tindakan persuasif untuk meminimalisir terjadinya konflik diantara mereka. Hal ini sesuai dengan teori persuasi bahwa dalam teori ini kunci keberhasilan persuasi terletak pada kemampuan mengubah struktur psikologis individu sehingga hubungan psikodinamik antara proses internal yang laten (motivasi, sikap dll) dengan perilaku yang diwujudkan sesuai dengan kehendak komunikator. Jadi bagaimana pihak diskoperindag membangun kredibilitasnya sehingga pesan persuasi yang disampaikan dapat mengubah psikologis PKL dengan cara sedemikian rupa. Adapun komunikasi yang disampaikan dengan cara personal maupun kelompok melalui paguyuban PKL yang mereka bentuk, komunikasi tersebut dilakukan karena Diskoperindag menyadari bahwa hal tersebut cukup efektif dalam menyampaikan sebuah pesan. Menurut Devito (Liliweri, 1997 :13)

1. Keterbukaan (openess):

Para PKL diharapkan bersifat terbuka dengan menceritakan keadaan mereka selania ini, baik manfaat selama mereka berjualan di alun-alun berikut pula permasalahan-permasalahan yang dirasakan.

Sehingga pihakpemerintah dalam hal iniDiskoperindag dapat mengambil kebijakan atas permasalahan tersebut

2. Empati (empathy);

Adanya rasa saling melindungi dan saling membantu antara PKL dengan pihak Diskoperindag

3. Dukungan (Supportiveness);

Adanya dukungan berupa bantuan untuk membantu dengan merelokasi mereka ke tempat yang lebih luas dan maemadai berikut penyediaan sarana dan prasarananya.

4. Rasa Positif (positiveness);

Tumbuhnya rasa percaya sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling membantu antara PKL dengan Diskoperindag .

5. Kesetaraan (equality).

Munculnya rasa kebersamaan dan senasib sperjuangan antara Diskoperindag danPKL.

Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif, negatif dan netral. Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan.

Selain itu PKL adalah kelompok kecil yang memiliki komunitas yang bernama paguyuban PKL, maka hal ini juga dimanfaatkan oleh Diskoperindag dalam menyampaikan segala jnformasinya. Karena tujuan dan komunikasi kelompok kecil, menurut Shaw (1976) apabila ditinjau dari kategori yang bertujuan dengan tugas adalah

1. Pembuatan Keputusan

Mereka (PKL) mempunyai berbagai tujuan diantaranya yaitu bagaimana mereka dapat menjajakan barang dagangannya, bagaimana mereka mempunyai tempat yang layak untuk berjualan dll. Sehingga dari semua tujuan yang diinginkan pada akhirnya mereka dapat menentukan pilihan mana yang tepat bagi kelompoknya Begitujuga dengan pihak Diskoperindag yang Juga mempunyai tujuan-tujuan. Salah satunya denga merelokasi dan mereloksi PKL selama ini dengan baik.

2. Pemecahan Masalah

Dengan paguyuban yang ada maka pihak Diskoperindag berupaya mencari solusi atas segala permasalahan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Disamping itu mereka membangun hubungan kerja yang baik dengan meminimalisir atas terjadinya konflik.

Apa yang dilakukan oleh Diskoperindag sesuai pula dengan teori Participatory Rural Community Appraisal (PRCA), dalam teori ini lebih mengutamakan partisipasi serta pemberdayaan, dengan melibatkan peran masyarakat secara penuh. Dengan saling tukar informasi satu sama lain untuk mengakomodir segala kebutuhan yang di inginkan. Begitu pula dengan pihak Diskoperindag, kebijakan yang diambil atas dasar kebutuhan yang diinginkan oleh PKL. Salah satunya adalah penyediaan lahan baru. Dalam teori ini disebutkan terdapat dua tipe pendekatan yang salah satunya yaitu NOPS (Needs, Opportunities, Problem, Solution). Needs yaitu kebutuhan yang diinginkan oleh PKL, Diskoperindag berupaya untuk memenuhinya dengan penyediaan lahan baru sebagai alternatif adanya relokasi tersebut hal ini merupakan pilihan pilihannya. Dengan (Opportunities) khususnya bagi warga masyarakat Bondowoso untuk membuka wirausaha mengingat tempat baru (Jembatan Ki Ronggo) lebih memadai daripada sebelumnya sehingga dapat menampung keberadaan PKL. Permasalahan (Problem) yang menjadi kekhawatiran bagi PKL sudah diakomodir oleh pihak Diskoperindag dengan melakukan koordinasi dengan instansi maupun pihak terkait, sehingga dapat

menentukan Solusi(solution) Yang tepat atas permasalahan tersebut.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam menyusun strategi komunikasi dalam kaitannya relokasi PKL, Diskoperindag Kabupaten Bondowoso perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi agar dapat mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik selama proses berlangsung maupun masa yang akan datang. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat Adapun faktor pendukung dalam relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso sebagaimana atas yang peneliti peroleh antara lain dilihat dari ungkapan Sigit Purnomo sebagai berikut:

“Dalam relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso ini faktor pendukungnya yang pertama :Diskoperindag menyediakan lahan baru sebagai pengganti mereka yang sebelumnya berjualan di lokasi alun-alun, yang kedua; partisipasi masyarakat khususnya para PKL yang asli warga Bondowoso hal ini berdasar bahwa kami pihak Diskoperindag tidak pernah memungut atau meminta kepada PKL atas lahan yang mereka tempati selama ini. “ (wawancara 6 Agustus 2019).

Berdasar pada data yang diperoleh peneliti sebagai penjabar pernyataan yang diungkap oleh Sigit Purnomo yakni:

1. Penyediaan Lahan Baru

PKL yang semula berada di alun-alun semenjak tahun 2004 dan lambat laun keberadaan para PKL tersebut bertambah banyak, maka dirasa perlu ditata kembali dengan mengembalikan fungsinya yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau

(RTH), kegiatan pemerintah dan tempat rekreasi masyarakat. Dengan demikian Diskoperindag perlu membuat kebijakan bawasannya mereka sebaiknya direlokasi ke tempat yang baru. terkait dengan tempat yang baru tersebut pihak Diskoperindag mempunyai alternatif tiga tempat yaitu; PKL Kuliner di area Jembatan Ki Ronggo, PKL Kuliner disebelah selatan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bondowoso, Sebagian area diluar Stadion Magenda Bondowoso. Memang hal ini tidak mudah karena menyangkut sarana dan prasarana, selain itu juga para PKL sudah merasa nyaman dengan kondisi selama ini. Mereka memandang bahwa alun-alun adalah tempat untuk mengkai rezeki yang sudah dikenal oleh para pelanggannya, atas dasar inilah rasa kekhawatiran pun muncul manakala keberadaan mereka akan dipindah. Hal ini juga dirasakan oleh Ahmad (29 Th) beliau adalah seorang pedagang Nasi yang sudah berjualan di alun-alun selama 11 tahun lamanya dalam penuturannya sebagai berikut:

“ waduh . . kalau dipindah bagaimana lagi ya mas, masalahnya saya di sini sudah lama dan saya sendiri sudah mempunyai pelanggan. Kalau dipindah pelanggan saya nantinya mencari saya lagi. “ (wawancara 5 juli 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak Diskoperindag melakukan sebuah pendekatan baik secara personal maupun kelompok berangsur-angsur mereka sadar bahwa apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah serta merta untuk kebaikan kota Bondowoso itu sendiri, belum lagi melihat banyaknya PKL saat alun-

alun bukanlah tempat yang memadai untuk menampung keberadaan mereka.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat dalam hal ini adalah PKL khususnya mereka yang asli sebagai warga Bondowoso, mereka mempunyai kesadaran bahwa sebagai warga yang mata Pencaharian selama ini sebagai pedagang Sangat dibutuhkan Partisipasinya guna membann kota Bondowoso. Selajni itu pihak merintah daerah selama ini tidak pernah meminta kompensasi apapun atas lahan yang mereka tempatkan pemerintah memberikan fasilitas atas kebutan yg mereka perlukan. Dengan penyediaan lahan baru yang saat ini berada di kawasan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso sarana dan prasarana yang ada nantinya lebih memadai dari sebelumnya terlebih tempat parkir yang lebih luas sehingga kehadiran Pengunjung akan lebih banyak. Atas dasar inilah kesadaran tersebut muncul dan pada akhirnya PKL dapat menerima atas kebijakan yang diberikan oleh pthk Diskoperindag Kabupaten Bondowoso.

3. Media

Pihak dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso mengakui bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak lepas dari peran media. cetak khususnya Koran Bhirawa, Radar Bondowoso dan Memo. Mereka secara terus menerus ikut dalam mensosialisasikan program-program pemerintahan terlebih pada Diskoperindag guna mewujudkan keinginannya dalam mereloksi para PKL selama ini.

Namun sebagai lembaga yang bergerak di bidang kebersihan

dan pertamanan dihadapkan pada kondisi dan permasalahan yang ada. Permasalahan yang dimaksud yaitu Perbedaan kepentingan. Keanekaragaman sosial dan budaya merupakan suatu warna sekaligus keunggulan bagi kehidupan terlebih pada bangsa kita. Akan tetapi keanekaragaman tersebut justru menjadi salah satu faktor penghambat, pemicuadanya kontroversial. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Menurut Sigit Purnomo beberapa permasalahan ini muncul disebabkan oleh “lahan” yang selama ini mereka miliki adalah asset bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dalam hal ini adalah preman dan jukir.

“Sudah tentu dalam relokasi PKL kami menemui suatu kendala. Kami menyadari bahwa ada pihak lain yang merasa dirugikan, karena mereka sudah menganggap bahwa kehadiran PKL tersebut adalah lahan penghidupan. “(wawancara 6 Agustus 2019).

Dengan dalih keamanan dan kenyamanan bagi PKL, preman ada dibalik layanan tersebut, dengan memasang tarif yang cukup bervariasi untuk setiap PKL yang ada di kawasan alun-alun. Meskipun jasa tersebut tidak pernah disampaikan oleh PKL akan tetapi kondisi merupakan kondisi alamiah yang juga terjadi dimana-mana. Begitu pula dengan keberadaan jukir yang sudah mengklaim terhadap area yang mereka gunakan tanpa harus melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

D. Analisa Faktor pendukung dan Faktor Penghambat

Relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso dapat diartikan sebagai usaha atau cara untuk menguat jadi lebih baik segala sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh manusia sehingga semakin menimbulkan Perasaan senang dengan demikian akan menarik bagi masyarakat yang berkunjung. Dalam penatan PKL ini perlu diperhatikan tentang sarana dan prasarana, infrastruktur dan masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat dua faktor yang berpengaruh yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berkaitan dengan potensi yang bernilai lebih baik dan mendukung kemajuan sedangkan penghambat berkaitan dengan kendala yang harus mendapat pemecahan. Dalam pembahasan ini akan dianalisis mengenai faktor pendukung dan penghambat serta upaya pemecahannya oleh Diskoperindag kabupaten Bondowoso dalam menghadapi kendala agar tidak menjadi hambatan dalam upaya relokasi PKL khususnya yang berada di Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso.

E. Analisis Faktor Pendukung dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso dalam program relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso yaitu:

1. Penyediaan Lahan Baru

PKL adalah suatu komunitas pedagang yang secara tidak langsung memberi dampak bagi perkembangan pemerintah daerah Bondowoso khususnya mengenai pendapatan daerah serta potensi wisata merasa bertanggung jawab atas segala kebutuhan para

PKL.Rubin dan Rubin (1992; 57) mengidentifikasi fungsi pemerintah dalam kaitannya pengembangan masyarakat salah satunya adalah mendesain program pembangunan dan menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana. Alternatif dengan memberikan penyediaan lahan baru adalah solusi yang tepat oleh dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso untuk meminimalisir adanya konflik dengan pihak PKL dilain sisi Diskoperindag perlu untuk mewujudkan keinginannya dengan mengembalikan fungsi dari alun-alun sendin. Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso adalah salah satu tempat alternatif dapat menjadi sebuah pemikiran baru bagi PKL untuk lebih terpacu dalam pengembangan usahanya. Hal ini berdasar pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut cukup memadai dengan area parkir yang luas diharapkan kehadiran para pengunjung lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini memberi peluang khususnya bagi warga Bondowoso untuk membuka wirausaha. Dari sinilah gejala perekonomian masyarakat nantinya dapat berkembang pesat. Disamping itu penempatan lahan baru ini dapat membawa dampak dari sisi pengembangan wisata kota Bondowoso. Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso yang semula berfungsi dan sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dan event bidang keolahragaan, namun dengan kehadiran PKL yang berada dikawasan tersebut mempunyai nilai lain dengan kata lain Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso nantinya dapat menjadi salah satu objek wisata Bondowoso.

2. Partispasi Masyarakat

Menurut Ife (1995; 72) salah satu prinsip pengembangan masyarakat adalah ;“*Participation yaitu : pengembangan masyarakat sedapat mungkin memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat secara langsung aktif dalam aktivitas dan proses masyarakat. Partispasi ini juga harus didasarkan pada kesanggupan masing-masing, artinya setiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu diperhatikan adanya upaya yang dapat menjamin berbagai kelompok masyarakat.*”

Kesadaran masyarakat (PKL) dalam kaitannya keterlibatan mereka untuk ikut serta berperan dalam pembangunan sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso khususnya oleh Diskoperindag. Kehadiran mereka merupakan pekerjaan rumah untuk mempedulikan dengan memfasilitasinya baik berupa sarana dan prasarannya. Pemerintah menyadari bahwa segala keputusan yang diambil nantinya bukan merupakan produk tunggal. Mereka mengajak bersama-sama dengan PKL untuk mencari solusi serta memberikan pengertian bahwa PKL bukanlah kelompok yang terimarjinalkan melainkan mereka adalah kelompok informal yang mempunyai potensi yang harus diberdayakan

3. Media

Peran media sangat dibutuhkan terlebih kondisi dimana pihak Diskoperindag, dalam melakukan suatu programnya terlebih padarelokasi PKL alun-alun. Bagaimanapun media adalah sarana publikasi bagi pemerintah dengan menjalin hubungan yang baik diharapkan pihak media dapat

membantu mempublikasikannya dengan menyuarakan-menyuarakan atas tujuan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan dengan maksud kesemuanya agar dapat berjalan dengan baik. Informasi yang menyeluruh merupakan efektivitas yang dirasakan oleh pihak dinas kebersihan dan petamanan.

Setelah mengetahui faktor pendukung dalam kaitannya relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso yang dilakukan oleh Diskoperindag, maka peneliti melakukan analisis terhadap faktor penghambat, yang menjadi kendala bagi program kegiatan Diskoperindag tersebut.

F. Analisis Faktor Penghambat Diskoperindag Bondowoso dalam program relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso yaitu;

Kondisi masyarakat yang beranekaragam memang susah untuk disatukan karena adanya perbedaan kepentingan diantara mereka. Namun dapat juga perbedaan tersebut menjadi sumber kekuatan baru disuatu wilayah. Seperti perbedaan kondisi di wilayah Bondowoso jang sampai hal itu menjadi problema masyarakat sehingga diperlukan pembiasaan dan penjelasan dari Diskoperindag terkait dengan relokasi PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso. Apapun yang dilakukan oleh dinas tersebut harus balance (seimbang) pada semua pihak seperti yang dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi antar kedua pihak harus terjalin dengan baik terlebih Diskoperindag pada mulanya memberikan berbagai alternative tempat dimana PKL tersebut dapat ditampung. Sehingga apa yang menjadi pihak-pihak yang merasa dirugikan baik kalangan preman

maupun para jukir masih mempunyai “lahan” kehidupan bagi mereka.

Hasil Pembahasan

Setelah adanya hasil pengamatan pada dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso sebagai pihak yang berwenang merelokasi PKL alun-alun yang saat ini sudah direlokasi ketempat yang baru yaitu kawasan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso menunjukkan adanya kepuasan dari dinas tersebut yang menggambarkan bahwa PKL di kawasan Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso tersebut sudah cukup tertata dengan baik. Hal ini tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan dengan berbagai pihak instansi terkait. Pemerintah menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang mau tidak mau harus dipedulikan hal ini berdasar pada bahwa PKL telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan baik dipandang dari segi pendapatan daerah maupun nilai estetika yakni diharapkan dapat menjadi salah satu objek wisata yang ada di Bondowoso. Untuk wujudkan itu semua memang tidak mudah dalam mengatur PKL pihak dinas kebersihan dan pertamanan menemui suatu kendala dan pada akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi tanpa harus menimbulkan konflik. Guna mempermudah dalam menyajikan pembahasan penelitian ini, berikut peneliti sajikan melalui matrik indikator

N o	Permasalahan	Keterangan
1	Jumlah PKL	150 PKL
2	Yang berwenang mengelola PKL	Dilakukan oleh dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Bondowoso selaku pihak yang berwenang dalam relokasi PKL
3	Desain kebijakan	Kebijakan relokasi telah disahkan oleh Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2017
4	Penggunaan	Dalam relokasi PKL

	media	Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso lebih mengedepankan komunikasi interpersonal dan kelompok melalui paguyuban PKL. Media yang sering membantu dalam pelaksanaan program ini yaitu Koran Bhirawa, Radar Ijen dan Memo.
5	Strategi yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Dalam pendataan ditemukan bahwa hanya 80 % dan komunitas PKL yang ada mereka adalah penduduk asli warga Bondowoso. Hal ini memudahkan bagi pihak Diskoperindag dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada mereka. - Perencanaan Diskoperindag membuat solusi dengan memberikan 3 tempat alternatif sebagai lahan baru sebelum mereka di relokasi dan pada akhirnya Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso adalah tempat untuk menampung keberadaan PKL. Diskoperindag melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait atas tujuan yang dimaksud yaitu : dinas Koperasi, Dinas Perhubungan

		<p>, Satpol PP, TNI dan Poiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Disamping sosialisasi dilakukan oleh pihak Diskoperindag, pihak media juga mempunyai peranan penting dalam kaitannya membantu proses pelaksanaan relokasi PKL - Kebijakan Kebijakan yang diterapkan oleh pihak Diskoperindag merupakan produk bersama dengan membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam program pembangunan pemerintah. Dengan melalui pendekatan personal maupun kelompok melalui paguyuban PKL mereka bersama-sama berbagi pengalaman.
6	Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan baru - Partisipasi masyarakat dilibatkan, dalam hal ini kesadaran PKL bahwa peran pemerintah yang peduli atas keberadaan mereka selama ini
7	Faktor penghambat	Perbedaan kepentingan, khususnya bagi Jukir, dengan memiliki lahan parkir yang mereka kelola merupakan

		pendapatan tersendiri bagi mereka
8	Dampak	PKL dan Jukir yang ada,serta paguyuban PKL menyadari bahwa tujuan dan kepentingan Diskoperindag merupakan tujuankepentingan bersama
9	Monitoring & evaluasi	Diskoperindag dan dinas terkait sudah melakukan koordinasi baik dengan pihak dinas perhubungan yang nantinya mengelolah jasa parkir begitu juga dengan pihak dinas Koperasi yang diharapkan nantinya dapat memberikan fasilitas permodalan, sedangkan kenyamanan dan ketertiban mengenai lahan yang ditempati oleh PKL diatur oleh Dispora

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka pada bab akhir ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

a. Strategi komunikasi organisasi pemerintah kabupaten Bondowoso dalam Penataan PKL Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo menggunakan konsep Chris Kamlongera dengan teori yang diterapkan yaitu Participatory Rural Community Appraisal (PRCA) yang digambarkan sebagai berikut:

1. PKL merupakan kelompok yang berpotensi yang dapat memberikan kontribusi dalam kaitannya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) , selain itu apabila keberadaan mereka ditata lebih baik akan menjadi objek wisata. Atasdasar inilahsebagai bentuktang gungjawab pemerintah adalah deng anmemberdayakannya salahsatunya denganmerelokasime rekaketempat yang memadai.

2. Dalam menyelesaikan masalah pihak dinas Kebersihan dan Pertaman beserta PKL bersama-sama untuk mencari solusi sesuai yang diinginkan, sehingga kebijakan yang diputuskan adalah hasil produk bersama.
3. Transformasi informasi yang diterapkan oleh Diskoperindag cukup efektif dengan melalui personal maupun kelompok yang ada (paguyuban), begitu juga penggunaan media cetak sebagai sarana publisitasnya.
4. Tipe pendekatan yang digunakan dilandasi dengan NOPS yaitu **Needs** : kebutuhan PKL bukan serta merta bagaimana merek dapat menjajakan barang dagangannya melainkan mereka juga membutuhkan tempat yang layak serta memadai dengan melihat aspek kenyamanan dan keamanan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Budyatna, Leilamonaganiem, *Teori Komunikasi antar Pribadi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu hingga Massa*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Teori Paradigm dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Veithzalrivai, Bactiar, Boy Rafliamar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang(YA3), 1990.
- Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riana, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pius A Partanto, M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Apolo,1994.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press,1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2015